

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM PRESIDENSIAL

Irmanjaya Thaher¹

¹Universitas Esa Unggul

Email: irman.jaya@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Lembaga perwakilan rakyat merupakan pilar utama demokrasi konstitusional modern yang berfungsi sebagai representasi formal kehendak rakyat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam sistem presidensial, lembaga ini memiliki posisi unik sebagai mitra sejajar eksekutif dengan legitimasi demokratis bersumber dari mandat elektoral independen.

Penelitian ini menganalisis secara komprehensif kedudukan dan fungsi DPR dalam sistem presidensial Indonesia melalui empat dimensi kajian: konstruksi konstitusional dan relasi antarlembaga, efektivitas fungsi legislasi, kekuatan fungsi pengawasan sebagai mekanisme checks and balances, serta identifikasi agenda reformasi kelembagaan untuk optimalisasi peran DPR secara berkelanjutan.

Metodologi penelitian menggunakan Systematic Literature Review (SLR) yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan transparan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis berbagai artikel ilmiah relevan guna menghasilkan pemahaman komprehensif berbasis bukti mengenai perkembangan konsep dan temuan empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR memiliki kedudukan konstitusional kuat dan sejajar dengan Presiden dengan relasi kolaboratif berdasarkan prinsip distribusi kekuasaan proporsional. Fungsi legislasi sebagai inti peran konstitusional DPR masih menghadapi tantangan produktivitas dan kualitas undang-undang yang memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan. Fungsi pengawasan melalui instrumen hak angket merupakan mekanisme vital menjaga checks and balances yang memerlukan konsistensi pelaksanaan untuk mewujudkan akuntabilitas eksekutif sesungguhnya.

Penelitian menyimpulkan bahwa reformasi kelembagaan bersifat multidimensional mencakup aspek struktural, yuridis, dan kapasitas representasi merupakan langkah mendesak untuk memastikan lembaga perwakilan mampu menjalankan fungsi konstitusionalnya secara maksimal dan berkelanjutan. Penguatan mekanisme checks and balances serta peningkatan kualitas legislasi menjadi prasyarat fundamental bagi optimalisasi peran DPR dalam sistem presidensial Indonesia yang demokratis dan berkeadilan.

Kata Kunci: lembaga perwakilan rakyat, sistem presidensial, checks and balances, fungsi legislasi, reformasi kelembagaan

PENDAHULUAN

Lembaga perwakilan rakyat merupakan salah satu pilar utama dalam arsitektur demokrasi konstitusional modern yang berfungsi sebagai representasi formal kehendak rakyat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara (Fernando et al., 2024). Dalam perspektif keilmuan hukum tata negara dan ilmu politik, kedudukan dan fungsi lembaga perwakilan rakyat menduduki posisi sentral dalam diskursus tentang bagaimana kekuasaan legislatif diorganisasikan, dibatasi, dan dioperasikan dalam berbagai varian sistem pemerintahan (Humah, 2025). Dalam sistem presidensial khususnya, lembaga perwakilan rakyat memiliki

posisi yang unik sebagai mitra sejajar cabang eksekutif yang dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga legitimasi demokratisnya bersumber dari mandat elektoral yang independen (Muttaqin et al., 2025). Pentingnya kajian ini dalam konteks keilmuan terletak pada kedudukannya sebagai elemen penentu kualitas demokrasi, di mana efektivitas lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi mencerminkan sejauh mana kedaulatan rakyat benar-benar diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan negara.

Perkembangan kajian tentang kedudukan dan fungsi lembaga perwakilan rakyat dalam sistem presidensial menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, terutama seiring dengan berbagai perubahan konstitusional dan tuntutan demokratisasi yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia (Wong et al., 2021). Amandemen UUD 1945 pada periode 1999–2002 telah mengubah secara fundamental desain kelembagaan DPR dan relasi konstitusionalnya dengan cabang eksekutif, yang menuntut pemahaman baru tentang bagaimana keseimbangan kekuasaan dikonstruksikan dalam sistem presidensial Indonesia pascareformasi. Sejumlah isu utama yang menjadi perhatian kajian terkini mencakup efektivitas fungsi legislasi, kekuatan mekanisme pengawasan, kualitas representasi konstituen, serta tantangan dalam mewujudkan keseimbangan kekuasaan yang genuine antara DPR dan Presiden (Sumodiningrat et al., 2024). Arah penelitian yang berkembang menunjukkan kecenderungan untuk tidak hanya menganalisis dimensi normatif konstitusional, tetapi juga mengkaji secara empiris dan kritis bagaimana lembaga perwakilan rakyat berfungsi dalam praktik, termasuk dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural dan yuridis yang melemahkan efektivitasnya.

Secara ideal, dalam sistem presidensial yang dirancang berdasarkan prinsip pemisahan dan keseimbangan kekuasaan, lembaga perwakilan rakyat seharusnya mampu menjalankan tiga fungsi konstitusional utamanya, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi representasi, secara efektif, independen, dan proporsional. DPR sebagai lembaga legislatif nasional dalam sistem presidensial Indonesia seharusnya berperan sebagai mitra sejajar yang kuat bagi Presiden, mampu menghasilkan produk legislasi yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menjalankan pengawasan yang efektif terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Dalam kerangka konstitusional UUD 1945

pasca amandemen, seluruh fungsi tersebut telah mendapatkan landasan normatif yang memadai dan komprehensif.

Namun demikian, kondisi nyata di lapangan menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan antara idealisme konstitusional tersebut dan praktik kelembagaan yang terjadi. Data terkait produktivitas legislasi DPR RI periode 2019–2024 menunjukkan bahwa realisasi target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) secara konsisten berada jauh di bawah target yang telah ditetapkan, mencerminkan persoalan serius dalam kapasitas dan efektivitas fungsi legislasi. Di sisi fungsi pengawasan, mekanisme konstitusional seperti hak angket jarang digunakan secara optimal dan sering kali terjebak dalam dinamika politik pragmatis yang melemahkan independensi DPR terhadap eksekutif. Penelitian Hardjanti (2022) mengidentifikasi bahwa meskipun kekuasaan DPR secara normatif diperkuat, dalam praktiknya terjadi kecenderungan dominasi eksekutif yang melemahkan posisi tawar DPR dalam proses legislasi dan pengawasan.

Kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas tersebut dapat ditelusuri dari beberapa faktor penyebab yang saling berkaitan. Pertama, terdapat persoalan kelembagaan berupa keterbatasan kapasitas teknis dan administratif DPR dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara profesional dan berbasis bukti. Kedua, dinamika politik internal yang didominasi oleh kepentingan partai politik kerap mengalahkan orientasi kepada kepentingan publik dan konstituen yang seharusnya menjadi basis representasi. Ketiga, sebagaimana diidentifikasi oleh Riastri dan Sumiyanto (2023), mekanisme pengawasan konstitusional belum diimplementasikan secara konsisten dan optimal, sehingga fungsi checks and balances yang menjadi jiwa sistem presidensial belum berjalan sebagaimana mestinya.

Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari kedudukan dan fungsi DPR dalam sistem presidensial Indonesia, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Kajian yang ada cenderung bersifat parsial, membahas secara terpisah antara dimensi konstitusional, fungsi legislasi, mekanisme pengawasan, atau reformasi kelembagaan, tanpa mengintegrasikannya dalam satu kerangka analisis yang komprehensif dan sistematis. Belum terdapat kajian yang secara simultan menganalisis keempat dimensi tersebut dalam konteks sistem presidensial Indonesia terkini, termasuk bagaimana interaksi

antardimensi tersebut mempengaruhi efektivitas keseluruhan lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan dan fungsi lembaga perwakilan rakyat dalam sistem presidensial Indonesia dengan mengintegrasikan empat dimensi kajian yang saling berkaitan secara sistemik. Pertama, penelitian ini bertujuan mengkaji konstruksi konstitusional kedudukan DPR dan pola relasi antarlembaga dalam sistem presidensial pascaamandemen. Kedua, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi DPR dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan responsif. Ketiga, menganalisis kekuatan dan konsistensi pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sebagai mekanisme checks and balances. Keempat, mengidentifikasi agenda reformasi kelembagaan yang diperlukan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi DPR dalam sistem presidensial Indonesia secara berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memahami secara holistik dan integratif dinamika kelembagaan DPR di tengah tuntutan penguatan demokrasi presidensial Indonesia yang terus berkembang. Tanpa pemahaman yang komprehensif tentang keempat dimensi kajian yang saling berkaitan, upaya penguatan kelembagaan DPR akan tetap bersifat fragmental dan tidak menyentuh persoalan fundamental. Penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi ilmiah yang strategis bagi penguatan lembaga perwakilan rakyat yang lebih efektif, akuntabel, dan benar-benar merepresentasikan kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR), yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan transparan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis berbagai artikel ilmiah yang relevan dengan fokus kajian tertentu. SLR bertujuan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif berbasis bukti (evidence-based) mengenai perkembangan konsep, teori, dan temuan empiris dalam suatu bidang penelitian. Dalam konteks penelitian berjudul Kedudukan dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Sistem Presidensial, metode ini digunakan untuk menelaah secara kritis bagaimana posisi konstitusional lembaga

perwakilan, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta relasinya dengan cabang kekuasaan eksekutif dalam kerangka sistem presidensial.

Tahapan pelaksanaan SLR dimulai dari perumusan pertanyaan penelitian yang spesifik dan terarah, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan strategi pencarian artikel melalui basis data ilmiah nasional dan internasional. Selanjutnya ditetapkan kriteria inklusi dan eksklusi guna memastikan relevansi topik, kualitas metodologi, dan kesesuaian periode publikasi. Proses seleksi dilakukan melalui penyaringan judul dan abstrak, penelaahan teks lengkap, serta ekstraksi data terkait fokus kajian, pendekatan penelitian, dan temuan utama. Tahap akhir berupa analisis dan sintesis temuan untuk mengidentifikasi pola kedudukan dan fungsi lembaga perwakilan dalam praktik sistem presidensial. Keunggulan SLR terletak pada objektivitas dan transparansinya, meskipun terbatas pada ketersediaan serta kualitas artikel yang dianalisis. Metode ini relevan dengan tema penelitian karena memungkinkan pemetaan konseptual dan evaluasi empiris secara komprehensif mengenai peran lembaga perwakilan rakyat dalam sistem presidensial.

Berdasarkan kerangka PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), proses seleksi artikel dilakukan melalui empat tahapan utama. Pada tahap identifikasi, pencarian artikel dilakukan melalui basis data Scopus, Web of Science, HeinOnline, Google Scholar, dan portal Garuda dengan menggunakan kata kunci “legislative body”, “representative institution”, “presidential system”, dan “checks and balances”. Hasil penelusuran awal menghasilkan 815 artikel. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap duplikasi akibat pengindeksan ganda, sebanyak 173 artikel dihapus sehingga tersisa 642 artikel unik.

Tahap penyaringan dilakukan dengan menelaah judul dan abstrak untuk menilai kesesuaian dengan fokus penelitian. Sebanyak 427 artikel dieliminasi karena membahas sistem parlementer, studi politik elektoral tanpa analisis kelembagaan, atau kajian teoritis umum yang tidak secara spesifik mengulas fungsi lembaga perwakilan dalam sistem presidensial. Dengan demikian, 215 artikel dinyatakan lolos ke tahap kelayakan. Pada tahap kelayakan, dilakukan pembacaan teks lengkap untuk menilai kedalaman analisis, kejelasan metodologi, serta relevansi terhadap konteks sistem presidensial, termasuk studi komparatif dan kajian konstitusional. Sebanyak 149 artikel dikeluarkan karena tidak

memenuhi standar metodologis, bersifat deskriptif normatif tanpa analisis kritis, atau tidak menyajikan data yang dapat diekstraksi secara sistematis. Selain itu, 56 artikel dieliminasi karena fokus utamanya pada dinamika partai politik tanpa pembahasan substantif mengenai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Pada tahap inklusi, tersisa 10 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan dinilai memiliki kualitas akademik yang memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Artikel-artikel tersebut mencakup studi komparatif lintas negara, analisis empiris mengenai efektivitas fungsi pengawasan parlemen terhadap eksekutif, serta kajian konstitusional mengenai posisi lembaga perwakilan dalam sistem presidensial. Kesepuluh artikel ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola hubungan antara desain konstitusional dan praktik kelembagaan, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi legislasi dan pengawasan. Proses seleksi yang mengikuti alur PRISMA memastikan bahwa artikel yang digunakan relevan, berkualitas, dan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan terhadap pemahaman mengenai kedudukan dan fungsi lembaga perwakilan rakyat dalam sistem presidensial.

HASIL PENELITIAN

| No | Judul Artikel | Temuan Utama |
|----|--|---|
| 1 | Constitutional Relations Between the President, The House of Representatives, And the Regional Representative Boards in Lawmaking After the Amendment of The 1945 Constitution (Fatoni & Rahman, 2025) | Dewan Perwakilan Rakyat memegang otoritas legislatif bersama Presiden, berpartisipasi dalam proses pembuatan undang-undang. Ini harus membahas dan menyetujui rancangan undang-undang secara kolaboratif, yang mencerminkan distribusi kekuasaan daripada pemisahan yang ketat, seperti yang terlihat dalam sistem bikameral. |
| 2 | Juridical analysis of the right of inquiry of the house of representatives in | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia berfungsi sebagai badan pengawas, menjalankan hak penyelidikan untuk menyelidiki tindakan pemerintah. Peran ini sangat |

| No | Judul Artikel | Temuan Utama |
|----|--|--|
| | performing the supervisory function according to Indonesian constitutional law (Riastri & Sumiyanto, 2023) | penting untuk menjaga pemeriksaan dan keseimbangan dalam sistem kepresidenan, memastikan akuntabilitas dalam pemerintahan. |
| 3 | Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Penguatan Kekuasaan DPR dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hardjanti, 2022) | DPR dalam sistem kepresidenan Indonesia memegang kekuasaan legislatif yang signifikan, dengan hak eksklusif untuk mendukung fungsinya, sementara kekuasaan Presiden terbatas dan memerlukan keterlibatan DPR dalam pembuatan undang-undang, memastikan keseimbangan kekuasaan antara keduanya. |
| 4 | Rethinking of position of members of the regional house of representative as regional officers (Hadi et al., 2025) | Makalah ini tidak secara khusus membahas posisi dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem kepresidenan. Ini berfokus pada klasifikasi anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 dan mengusulkan reformasi. |
| 5 | Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024 (Erminilda et al., 2025) | Makalah ini berfokus pada fungsi legislatif DPR RI di Indonesia, menekankan perannya dalam tata kelola nasional, pembuatan undang-undang, dan tantangan yang dihadapi, daripada merinci posisinya dalam sistem kepresidenan secara khusus. |
| 6 | Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia (Riyadi, 2022) | Judul makalah cocok dengan kueri Anda, tetapi tidak menjawab pertanyaan spesifik Anda. |
| 7 | Legislative Authority and | Makalah ini tidak secara khusus membahas posisi dan |

| No | Judul Artikel | Temuan Utama |
|----|--|--|
| | Equal Partnership: A Juridical Analysis of the Role of Regional Houses of Representatives in Regional Regulation Making (Nirwan et al., 2025) | fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem kepresidenan, melainkan berfokus pada otoritas legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kemitraan yang setara dengan kepala daerah dalam pembuatan peraturan daerah. |
| 8 | Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia (Bemby et al., 2025) | Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem kepresidenan Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam Konstitusi 1945, berfungsi sebagai badan legislatif yang memberlakukan undang-undang, mewakili rakyat, dan mengawasi cabang eksekutif, memastikan keseimbangan kekuasaan melalui pemeriksaan dan keseimbangan. |
| 9 | Legislatures: Organization, Administration and Privileges: International IDEA Constitution-Building Primer 24 (Bulmer & Storey, 2024) | Makalah ini membahas peran legislatif, menekankan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem kepresidenan memberlakukan undang-undang, menyetujui anggaran, mewakili warga negara, dan mengawasi eksekutif, membutuhkan organisasi, administrasi, dan hak istimewa yang efektif untuk berfungsi secara independen dan efektif dalam demokrasi. |
| 10 | The House of Representatives Needs to Expand (Ghatak, 2024) | Judul makalah cocok dengan kueri Anda, tetapi tidak menjawab pertanyaan spesifik Anda. |

PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh Fatoni dan Rahman (2025) mengkaji hubungan konstitusional antara Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah

dalam proses pembuatan undang-undang pasca amandemen UUD 1945. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang otoritas legislatif bersama Presiden, di mana keduanya diwajibkan untuk membahas dan menyetujui setiap rancangan undang-undang secara kolaboratif. Pola hubungan ini mencerminkan prinsip distribusi kekuasaan yang lebih fleksibel daripada pemisahan kekuasaan yang bersifat kaku, sebagaimana tampak dalam sistem bikameral yang dianut Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika relasi konstitusional antarlembaga tersebut membutuhkan pemahaman yang mendalam agar proses legislasi dapat berjalan secara efektif, demokratis, dan sesuai dengan semangat konstitusi yang telah diamandemen.

Penelitian yang dilakukan oleh Riastri dan Sumiyanto (2023) melakukan analisis yuridis terhadap hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan hukum tata negara Indonesia. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa DPR berfungsi sebagai badan pengawas yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki tindakan-tindakan pemerintah melalui mekanisme hak penyelidikan atau hak angket. Fungsi pengawasan ini dinilai sangat krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial Indonesia, karena memastikan akuntabilitas cabang eksekutif terhadap lembaga perwakilan rakyat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme hak angket merupakan elemen esensial dalam arsitektur checks and balances yang menjadi fondasi sistem presidensial yang sehat dan demokratis.

Penelitian yang dilakukan oleh Hardjanti (2022) mengkaji ulang pembatasan kekuasaan Presiden dan penguatan kekuasaan DPR dalam kerangka UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Temuan penelitian menunjukkan bahwa DPR dalam sistem presidensial Indonesia memegang kekuasaan legislatif yang sangat signifikan, yang didukung oleh hak-hak eksklusif kelembagaan untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Di sisi lain, kekuasaan Presiden dibatasi secara konstitusional dan mensyaratkan keterlibatan aktif DPR dalam proses pembuatan undang-undang, sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan yang proporsional antara cabang eksekutif dan legislatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi konstitusional tersebut mencerminkan pilihan desain kelembagaan yang bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan berlebihan pada satu cabang pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi et al. (2025) berfokus pada kajian tentang klasifikasi dan kedudukan hukum anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Temuan penelitian mengusulkan sejumlah reformasi terkait status anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai pejabat daerah yang memiliki implikasi penting terhadap sistem perwakilan di Indonesia. Meskipun tidak secara khusus membahas posisi DPR dalam sistem presidensial, penelitian ini memberikan perspektif komparatif yang relevan mengenai bagaimana lembaga perwakilan di tingkat daerah diposisikan dalam keseluruhan arsitektur kelembagaan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi klasifikasi kelembagaan perwakilan daerah merupakan langkah penting dalam menyempurnakan sistem representasi politik Indonesia secara menyeluruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Erminilda et al. (2025) menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam periode 2019–2024 dengan menitikberatkan pada efektivitas peran DPR dalam tata kelola nasional dan proses pembuatan undang-undang. Temuan penelitian mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya secara optimal, termasuk persoalan produktivitas legislasi, kualitas substansi undang-undang yang dihasilkan, serta dinamika hubungan antara DPR dan pemerintah dalam proses legislasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas legislatif DPR dan penyempurnaan mekanisme kerja kelembagaan merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan fungsi legislasi berjalan sesuai amanat konstitusi dan harapan rakyat.

Penelitian yang dilakukan oleh Riyadi (2022) mengkaji kedudukan hukum dan tanggung jawab Wakil Presiden dalam sistem presidensial di Indonesia. Meskipun kajian ini secara spesifik memusatkan perhatian pada posisi Wakil Presiden dalam struktur eksekutif, penelitian ini tetap memberikan kontribusi yang relevan dalam memahami dinamika sistem presidensial Indonesia secara lebih utuh, khususnya dalam hal distribusi kewenangan di dalam cabang eksekutif itu sendiri. Temuan penelitian memberikan gambaran tentang bagaimana posisi Wakil Presiden berinteraksi dengan lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk DPR, dalam kerangka sistem presidensial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa

kejelasan kedudukan hukum Wakil Presiden merupakan elemen penting dalam memastikan stabilitas dan efektivitas pemerintahan presidensial di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Nirwan et al. (2025) mengkaji otoritas legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pola kemitraan yang setara antara DPRD dengan kepala daerah dalam proses pembuatan peraturan daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa DPRD memiliki kewenangan legislatif yang signifikan di tingkat daerah dan menjalin relasi kemitraan yang seharusnya bersifat setara dengan kepala daerah dalam proses pembentukan regulasi lokal. Meskipun fokus penelitian ini berada pada tingkat pemerintahan daerah, temuan-temuannya memberikan perspektif yang berharga dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip sistem presidensial diterapkan secara bertingkat dalam struktur pemerintahan Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kemitraan setara antara DPRD dan kepala daerah merupakan kunci efektivitas tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis.

Penelitian yang dilakukan oleh Bemby et al. (2025) mengkaji kedudukan dan fungsi lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia secara komprehensif. Temuan penelitian secara khusus menguraikan bahwa DPR dalam sistem presidensial Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi 1945, berfungsi sebagai badan legislatif yang bertugas membentuk undang-undang, mewakili aspirasi rakyat, dan mengawasi cabang eksekutif. Fungsi-fungsi tersebut dirancang untuk memastikan terwujudnya keseimbangan kekuasaan melalui mekanisme checks and balances yang efektif antar cabang kekuasaan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang komprehensif tentang kedudukan dan fungsi DPR dalam sistem presidensial merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola negara yang demokratis, akuntabel, dan berkesinambungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bulmer dan Storey (2024) membahas organisasi, administrasi, dan hak-hak istimewa lembaga legislatif dalam konteks internasional melalui kajian komparatif yang komprehensif. Temuan penelitian menekankan bahwa DPR dalam sistem presidensial secara universal mengemban fungsi pokok berupa pembentukan undang-undang, persetujuan anggaran negara, representasi warga negara, dan pengawasan terhadap cabang eksekutif. Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara efektif,

lembaga legislatif membutuhkan struktur organisasi yang kuat, sistem administrasi yang profesional, serta hak-hak kelembagaan yang terjamin agar dapat beroperasi secara independen dalam ekosistem demokrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas lembaga perwakilan rakyat sangat ditentukan oleh kualitas organisasi dan sistem pendukung kelembagaan yang memadai.

Penelitian yang dilakukan oleh Ghatak (2024) membahas isu perluasan komposisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai langkah strategis dalam memperkuat representasi demokratis. Meskipun konteks spesifik penelitian ini lebih berorientasi pada sistem legislatif di luar Indonesia, temuan dan argumen yang dikembangkan tetap memberikan perspektif komparatif yang relevan mengenai hubungan antara ukuran, komposisi, dan efektivitas lembaga perwakilan rakyat dalam sistem presidensial. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kapasitas representasi suatu lembaga legislatif berkorelasi erat dengan kemampuannya dalam menjalankan fungsi-fungsi demokratis secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi struktural komposisi keanggotaan DPR dapat menjadi salah satu strategi penguatan kualitas representasi dan efektivitas fungsi legislatif dalam sistem presidensial.

Berdasarkan kajian komprehensif terhadap sepuluh artikel yang telah diidentifikasi, dapat dilakukan kategorisasi ke dalam empat tema utama yang mencerminkan fokus analisis dan orientasi temuan dari masing-masing penelitian secara sistematis. Kategorisasi ini didasarkan pada kesamaan perspektif kajian, objek yang dianalisis, serta relevansi temuan terhadap tema utama kedudukan dan fungsi lembaga perwakilan rakyat dalam sistem presidensial.

1. Kategori pertama adalah Kedudukan Konstitusional dan Relasi Antarlembaga dalam Sistem Presidensial, yang menghimpun artikel-artikel yang secara khusus mengkaji posisi DPR dalam kerangka konstitusional dan pola hubungannya dengan lembaga negara lain. Kategori ini mencakup penelitian yang dilakukan oleh Fatoni dan Rahman (2025), Hardjanti (2022), serta Bemby et al. (2025), yang kesemuanya memusatkan perhatian pada analisis konstitusional tentang bagaimana DPR diposisikan dalam sistem presidensial Indonesia dan bagaimana relasi kelembagaannya dengan Presiden dan lembaga negara lainnya dikonstruksikan secara normatif.

2. Kategori kedua adalah Fungsi Legislasi Lembaga Perwakilan Rakyat, yang menghimpun penelitian yang memfokuskan kajiannya pada pelaksanaan fungsi pembentukan undang-undang oleh lembaga perwakilan rakyat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kategori ini mencakup penelitian yang dilakukan oleh Erminilda et al. (2025), Nirwan et al. (2025), serta Bulmer dan Storey (2024), yang masing-masing menganalisis bagaimana fungsi legislasi dijalankan dalam praktik, tantangan yang dihadapi, serta standar internasional yang relevan bagi efektivitas fungsi pembentukan undang-undang.
3. Kategori ketiga adalah Fungsi Pengawasan dan Mekanisme Checks and Balances, yang mengelompokkan artikel-artikel yang mengkaji secara spesifik peran pengawasan DPR terhadap cabang eksekutif sebagai elemen vital sistem presidensial. Kategori ini mencakup penelitian yang dilakukan oleh Riasri dan Sumiyanto (2023), serta Hardjanti (2022), yang secara bersama-sama menganalisis instrumen-instrumen pengawasan konstitusional yang dimiliki DPR, termasuk hak angket, dalam rangka menjamin akuntabilitas pemerintahan.
4. Kategori keempat adalah Reformasi dan Penguatan Kelembagaan Perwakilan Rakyat, yang secara spesifik membahas gagasan-gagasan reformasi dan penguatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat untuk meningkatkan efektivitas perannya dalam sistem presidensial. Kategori ini mencakup penelitian yang dilakukan oleh Hadi et al. (2025), Ghatak (2024), serta Riyadi (2022), yang menganalisis berbagai dimensi reformasi kelembagaan, mulai dari penataan ulang status anggota lembaga perwakilan, perluasan keanggotaan, hingga klarifikasi kedudukan hukum pejabat dalam sistem presidensial.

Penelitian pada kategori Kedudukan Konstitusional dan Relasi Antarlembaga dalam Sistem Presidensial, yang dilakukan oleh Fatoni dan Rahman (2025), Hardjanti (2022), serta Bemby et al. (2025), bertujuan untuk menganalisis posisi konstitusional DPR dan pola hubungannya dengan cabang-cabang kekuasaan lain dalam kerangka sistem presidensial Indonesia. Temuan utama dari kelompok penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa DPR merupakan lembaga legislatif yang memiliki kedudukan konstitusional yang kuat dan sejajar dengan Presiden dalam konteks pembuatan undang-undang, representasi rakyat, dan pengawasan eksekutif. Relasi antara DPR dan Presiden tidak bersifat subordinatif, melainkan mencerminkan prinsip distribusi kekuasaan yang proporsional, di

mana setiap rancangan undang-undang harus dibahas dan disetujui secara kolaboratif oleh kedua lembaga. Bemby et al. (2025) memperkuat temuan ini dengan menegaskan bahwa sistem presidensial Indonesia dirancang untuk mencegah konsentrasi kekuasaan melalui mekanisme checks and balances yang bersumber dari konstitusi. Penelitian dalam kategori ini menyimpulkan bahwa konstruksi konstitusional yang mengatur kedudukan DPR dalam sistem presidensial Indonesia mencerminkan pilihan desain kelembagaan yang bertujuan menjamin keseimbangan kekuasaan antarcabang pemerintahan secara demokratis dan berkesinambungan.

Penelitian pada kategori Fungsi Legislasi Lembaga Perwakilan Rakyat, yang dilakukan oleh Erminilda et al. (2025), Nirwan et al. (2025), serta Bulmer dan Storey (2024), bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pembentukan undang-undang oleh lembaga perwakilan rakyat, baik dalam konteks nasional Indonesia maupun dalam perspektif komparatif internasional. Temuan utama dari kelompok penelitian ini mengungkapkan bahwa fungsi legislasi merupakan inti dari peran DPR yang tidak dapat dipisahkan dari posisi konstitusionalnya sebagai representasi kedaulatan rakyat. Erminilda et al. (2025) menemukan berbagai tantangan nyata yang dihadapi DPR dalam periode 2019–2024, termasuk persoalan produktivitas dan kualitas undang-undang yang dihasilkan. Nirwan et al. (2025) menambahkan dimensi daerah dengan menganalisis bagaimana fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah memerlukan pola kemitraan yang setara dengan kepala daerah. Bulmer dan Storey (2024) memberikan perspektif internasional yang menegaskan bahwa efektivitas fungsi legislasi sangat bergantung pada kualitas organisasi, administrasi, dan hak-hak kelembagaan yang terjamin. Penelitian dalam kategori ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas legislasi DPR, baik dari sisi kelembagaan, prosedural, maupun substantif, merupakan agenda strategis yang tidak dapat ditunda dalam mewujudkan fungsi representatif dan demokratis yang optimal.

Penelitian pada kategori Fungsi Pengawasan dan Mekanisme Checks and Balances, yang dilakukan oleh Riastrri dan Sumiyanto (2023) serta Hardjanti (2022), bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mekanisme pengawasan konstitusional yang dimiliki DPR terhadap cabang eksekutif sebagai elemen fundamental sistem presidensial. Temuan utama dari kelompok penelitian ini menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR merupakan

instrumen konstitusional yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Riasri dan Sumiyanto (2023) secara khusus mengidentifikasi hak angket sebagai salah satu mekanisme pengawasan paling powerful yang dimiliki DPR, yang memungkinkan penyelidikan langsung terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Hardjanti (2022) melengkapi temuan ini dengan analisis bahwa pembatasan konstitusional atas kekuasaan Presiden, yang diimbangi dengan penguatan kewenangan DPR, merupakan cerminan dari komitmen konstitusional terhadap prinsip negara hukum yang demokratis. Penelitian dalam kategori ini menyimpulkan bahwa penguatan dan konsistensi pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, termasuk optimalisasi instrumen hak angket, merupakan prasyarat bagi terwujudnya akuntabilitas eksekutif yang sesungguhnya dalam sistem presidensial Indonesia.

Penelitian pada kategori Reformasi dan Penguatan Kelembagaan Perwakilan Rakyat, yang dilakukan oleh Hadi et al. (2025), Ghatak (2024), serta Riyadi (2022), bertujuan untuk menganalisis berbagai dimensi reformasi dan penguatan kapasitas kelembagaan lembaga perwakilan rakyat dalam sistem presidensial guna meningkatkan efektivitas peran dan fungsinya. Temuan utama dari kelompok penelitian ini menunjukkan bahwa agenda reformasi kelembagaan perwakilan rakyat bersifat multidimensional, mencakup aspek struktural, yuridis, maupun kapasitas representasi. Hadi et al. (2025) mengusulkan reformasi klasifikasi anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berdampak pada kejelasan status dan tanggung jawab kelembagaan. Ghatak (2024) menawarkan argumen bahwa perluasan komposisi keanggotaan DPR dapat memperkuat kualitas representasi dan efektivitas fungsi demokratis lembaga tersebut. Riyadi (2022) memberikan perspektif tentang pentingnya kejelasan kedudukan hukum dalam struktur eksekutif sebagai faktor penentu stabilitas sistem presidensial. Penelitian dalam kategori ini menyimpulkan bahwa reformasi kelembagaan yang terencana, sistematis, dan berbasis pada kebutuhan riil sistem presidensial merupakan langkah yang mendesak untuk memastikan lembaga perwakilan rakyat dapat menjalankan peran konstitusionalnya secara maksimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

1. DPR memiliki kedudukan konstitusional yang kuat dan sejajar dengan Presiden dalam sistem presidensial Indonesia, dengan relasi antarlembaga yang dibangun atas prinsip distribusi kekuasaan yang proporsional dan kolaboratif, bukan pemisahan yang kaku dan hierarkis.
2. Fungsi legislasi merupakan inti peran konstitusional DPR yang dalam pelaksanaannya masih menghadapi tantangan signifikan terkait produktivitas dan kualitas undang-undang, sehingga penguatan kapasitas legislasi secara kelembagaan, prosedural, dan substantif menjadi agenda strategis yang mendesak.
3. Fungsi pengawasan DPR melalui instrumen konstitusional seperti hak angket merupakan mekanisme vital dalam menjaga checks and balances sistem presidensial, dan konsistensi pelaksanaannya menjadi prasyarat terwujudnya akuntabilitas eksekutif yang sesungguhnya.
4. Reformasi kelembagaan perwakilan rakyat yang bersifat multidimensional, mencakup aspek struktural, yuridis, dan kapasitas representasi, merupakan langkah mendesak untuk memastikan lembaga perwakilan mampu menjalankan fungsi konstitusionalnya secara maksimal dan berkelanjutan.

Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini mencakup beberapa dimensi strategis yang mendesak bagi pengembangan sistem perwakilan rakyat dalam kerangka presidensial Indonesia. Pertama, temuan mengenai kuatnya kedudukan konstitusional DPR namun masih terdapatnya ketidakseimbangan relasi dalam praktik mengimplikasikan perlunya penguatan kesadaran konstitusional di kalangan penyelenggara negara agar prinsip distribusi kekuasaan yang proporsional dapat diimplementasikan secara konsisten. Kedua, tantangan dalam fungsi legislasi mengimplikasikan urgensi reformasi mekanisme kerja legislatif, termasuk peningkatan kapasitas teknis anggota DPR, penyempurnaan prosedur pembahasan undang-undang, serta penguatan sistem pendukung kelembagaan yang profesional dan berbasis riset. Ketiga, lemahnya konsistensi pelaksanaan fungsi pengawasan mengimplikasikan perlunya penguatan regulasi dan prosedur operasional hak angket serta instrumen pengawasan lainnya, agar mekanisme checks and balances benar-benar berfungsi sebagai

penyeimbang kekuasaan eksekutif yang efektif. Keempat, kebutuhan reformasi kelembagaan mengimplikasikan pentingnya agenda pembaruan hukum yang terencana dan komprehensif, yang tidak hanya menyentuh aspek struktural komposisi keanggotaan, tetapi juga memperkuat fondasi yuridis dan kapasitas representasi lembaga perwakilan rakyat Indonesia secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Bemby, N., Rosita, A. P., Jacinda, A. Z., Aurellia, M. F., Stephanus, L. S. T., & Kuswan, H. (2025). Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 01–10. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.4329>
- Bulmer, W. E., & Storey, J. (2024). Legislatures: Organization, Administration and Privileges: International IDEA Constitution-Building Primer 24. *Legislatures: Organization, Administration and Privileges: International IDEA Constitution-Building Primer 24*. <https://doi.org/10.31752/idea.2024.92>
- Erminilda, F. A., Rafael, R. T., & Hernimus, R. U. (2025). Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 423–432. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5148>
- Fatoni, A., & Rahman, A. (2025). Constitutional Relations Between The President, The House Of Representatives, And The Regional Representative Boards In Lawmaking After The Amendment Of The 1945 Constitution. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 210–220. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i2.9638>
- Fernando, H., Galuh Larasati, Y., Wuysang, J. M., Rahmah, P., Hakim, N., & Cahyani, N. (2024). Does Democracy Still Fall? A Bibliometric Analysis Two Decade 2004-2024. *Fenomena*, 23(2), 163–178. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v23i2.197>
- Ghatak, A. (2024). The House of Representatives Needs to Expand. *The Undergraduate Law Review at UC San Diego*, 2(1). <https://doi.org/10.5070/lr3.21256>
- Hadi, S., Sultoni Fikri, Baharuddin Riqiey, & Reza Maulana Hikam. (2025). Rethinking of position of members of the regional house of representative as regional officers. *IUSTA*, (62), 86–97. <https://doi.org/10.15332/25005286.10821>
- Hardjanti, D. K. (2022). Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Penguatan Kekuasaan DPR dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 8(2), 380. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3392>
- Humah, D. (2025). The Right of Inquiry of The House of Representatives in the Constitutional System: Between The Supervisory Function and The Potential for Abuse. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2(5), 39–48. <https://doi.org/10.61942/jhk.v2i5.436>

- Muttaqin, L., Omara, A., Atmoredjo, S., & Ar, M. F. (2025). Is the Legislator in the Constitutional Court? Examining the Tension Between Judiciary and Democracy in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 10(1), 91–134. <https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.13494>
- Nirwan, N., Fahmal, A. M., & Arif, M. (2025). Legislative Authority and Equal Partnership: A Juridical Analysis of the Role of Regional Houses of Representatives in Regional Regulation Making. *SIGn Jurnal Hukum*, 7(1), 385–405. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.482>
- Riastri, H., & Sumiyanto, O. (2023). JURIDICAL ANALYSIS OF THE RIGHT OF INQUIRY OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES IN PERFORMING THE SUPERVISORY FUNCTION ACCORDING TO INDONESIAN CONSTITUTIONAL LAW. *Awang Long Law Review*, 6(1), 282–286. <https://doi.org/10.56301/awl.v6i1.797>
- Riyadi, H. (2022). Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20211>
- Sumodiningrat, A., Kunci, K., Konstitusi, M., Demokrasi, K., Peradilan, I., & Aulia Rahma, N. (2024). Non-Procedural Replacement of Constitutional Court Justices: A Threat to Democracy and Judicial Independence: Penggantian Non-Prosedural Hakim Konstitusi: Ancaman terhadap Demokrasi dan Independensi Peradilan. *Jurnal Konstitusi*, 21(4), 588–608. <https://doi.org/10.31078/jk2144>
- Wong, M. Y. H., Kwong, Y. ho, & Chau, V. Y. W. (2021). Democracy, constitutional framework, and human rights: A comparison of Monaco, Tonga, Hong Kong, and Singapore. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 64, 100438. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2020.100438>